PENGUMUMAN STATUS *CLEAR AND CLEAN* DAN SERTIFIKAT *CLEAR AND CLEAN* UNTUK IUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(Edaran Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara
Nomor 05.E/30/DJB/2015, tanggal 3 November 2015)

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat
Gubernur
di
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan telah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Pertambangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pengawasan terhadap Pe-

nyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah dalam bentuk pengumuman status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* terhadap:

- a. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya termasuk proses penyesuaian menjadi IUP dan IPR;
- b. IUP yang diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima oleh gubernur atau bupati/Walikota dan telah mendapatkan pencadangan wilayah sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

2. Bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara dan setelah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi (Kepmen ESDM No. 2737 K/30/MEM/2013), Kepulauan Maluku (Kepmen ESDM No. 4002 K/30/MEM/2013), Pulau Kalimantan (Kepmen ESDM No. 4003 K/30/MEM/2013), Pulau Papua (Kepmen ESDM No. 4004 K/30/MEM/2013), Pulau Jawa dan Bali (Kepmen ESDM No. 1204 K/SO/MEM/2014), Kepulauan Nusa Tenggara (Kepmen ESDM No. 1329 K/30/MEM/2014), dan Pulau Sumatera (Kepmen ESDM No. 1095 K/30/MEM/2013), Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan mekanisme permohonan Wilayah (tanpa melalui proses lelang).

3. Bahwa pemanfaatan komoditas tambang yang dihasilkan dari IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta sebagai bahan baku industri di dalam negeri.
4. Sebelum terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wilayah Pertambangan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah daerah bahwa penerbitan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diproses sepanjang memenuhi kriteria, diantaranya terdapat pembangunan berskala nasional, pembangunan infrastruktur, terjadinya ketimpangan antara supply dan demand mineral bukan logam dan batuan, dan sesuai dengan RTRW provinsi dan/atau kabupaten/kota.
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengawasan terhadap Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah dalam bentuk pengumuman status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* diberlakukan terhadap seluruh perizinan pertambangan dalam bentuk IUP yang berasal dari penyesuaian KP/SIPD, dan/atau perizinan pertambangan dalam bentuk IUP yang diterbitkan setelah lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 berdasarkan permohonan KP/SIPD yang telah diterima oleh gubernur atau bupati/walikota dan telah mendapatkan pencadangan wilayah sebelum terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009;

dan

- b. untuk IUP mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan IUP mineral bukan logam dan batuan yang terbit setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak memerlukan status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean*, termasuk dalam pemrosesan Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pemrosesan Rekomendasi Eksportir, Terdaftar, serta pemrosesan perizinan/rekomendasi lain yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Pemerintah Daerah tetap wajib melaporkan penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
ttt,
BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

(BN)